

**GERAKAN BURUH PABRIK AVILA PRIMA INTRA MAKMUR  
DI KECAMATAN MUNCAR TAHUN 2001-2003**  
*(The Labour Movement of the Avila Prima Intra Makmur Company  
in Muncar Subdistrict, 2001-2003)*

**Rohmatul Laila, Drs. IG. Krisnadi, M.Hum**

Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: [lailarohmatul@gmail.com](mailto:lailarohmatul@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya perselisihan perburuhan, untuk mengetahui proses perselisihan perburuhan, serta dampak terjadinya perselisihan perburuhan. Pendekatan sosiologi digunakan dalam tulisan ini yaitu untuk menganalisis tentang perburuhan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah. Sumber primer yang digunakan adalah melakukan wawancara langsung dengan Mantan HRD Avila Prima Intra Makmur, Mantan buruh Avila Prima Intra Makmur yang terlibat perselisihan perburuhan, buruh Avila Prima Intra Makmur, dan masyarakat Desa Tembokrejo. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari koleksi buku perpustakaan pusat Universitas Jember, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, dan Kecamatan Muncar. Banyak yang dilakukan buruh untuk memperjuangkan haknya dengan aksi pemogokan kerja. Penyelesaian perselisihan perburuhan di Avila Prima Intra Makmur yaitu dengan PHK terhadap 117 buruh dan dipenuhinya semua tuntutan buruh oleh pihak perusahaan. Perselisihan perburuhan ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dari segi sosial para buruh menerima perlakuan adil dari perusahaan, dengan dipenuhinya semua tuntutan buruh, sedangkan dari segi ekonomi sangat dirasakan oleh pihak perusahaan yang mengalami kerugian hingga milyaran rupiah, sedangkan 117 buruh yang ter PHK kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan

*Kata Kunci: Buruh, Perselisihan perburuhan, Avila Prima Intra Makmur.*

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the background of the labor dispute, to know the process of labor disputes, as well as the impact of the labor dispute. Sociological approach used in this paper is to analyze about labor. The method used in this study is the historical method. The primary source used is direct interviews with the former of HRD Avila Prima Intra Makmur, the former of Avila Prima Intra Makmur workers whom involved with the labor disputes, labor Avila Prima Intra Makmur and the people or society in Tembokrejo village. While secondary sources obtained from the library book collection center of Jember University, Faculty of Humanities, the Central Statistics Banyuwangi Regency, and Muncar district. Many efforts carried by the workers to fight for their rights to strike work. To solve the conflict of labor dispute Avila Prima Intra Makmur in which the layoff of 117 workers and the fulfillment of all the demands of the workers by the company. This labor dispute raises social and economic impacts. in terms of social workers receive fair treatment from the company, with the fulfillment of all the demands of the workers, while in terms of the economy is felt by the companies that suffered losses of billions of rupiah, while 117 workers were laid off lose their jobs so they can not earn money or loss their revenue.*

*Keywords: Labour, labor disputes, Avila Prima Intra Makmur.*

## 1. Pendahuluan

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling ujung timur Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 5.782,50 km dengan panjang garis pantai 291,5 km dan menyimpan potensi sumber daya pesisir cukup besar dan beragam. Kawasan perikanan di Kabupaten Banyuwangi terpusat di Kecamatan Muncar. Fungsi pengembangan kawasan perikanan Muncar adalah kawasan pengembangan perikanan rakyat dan industri perikanan terpadu. (Bappekab Banyuwangi, 2015). Kecamatan Muncar sebagai wilayah pesisir dan pelabuhan perikanan, serta menjadi sentra industri perikanan di Jawa Timur, sehingga di kecamatan ini terdapat kawasan industri perikanan antara lain industri pengolahan, industri minyak ikan, industri pengalengan ikan, industri pemindangan ikan, dan industri tepung ikan.

Tulisan mengenai Perkembangan Pabrik Avila Prima Intra Makmur di Kecamatan Muncar, membahas mengenai perkembangan pabrik dan struktur organisasi, serta perselisihan perburuhan yang terjadi pada tanggal 17 Nopember 2001 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2002, yang di dalamnya mengandung unsur protes, aksi demo, mogok kerja, dan PHK. Sebuah aksi kompak yang dilakukan para buruh pabrik untuk memprotes pihak perusahaan, mengenai upah lembur yang tidak dibayarkan. Hal tersebut awal mula penyebab terjadinya perselisihan antara buruh dan pihak majikan, hingga buruh melakukan aksi demo dan mogok kerja. Aksi itu menyebabkan terjadinya PHK massal terhadap buruh. Akibat dari PHK massal, bukan hanya buruh saja yang dirugikan, namun pihak perusahaan juga merasa dirugikan karena banyak buruh mogok kerja, sehingga aktifitas di pabrik menjadi lambat. Mengatasi perselisihan tersebut ada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi sebagai penengah dalam masalah ini. Perkembangan Pabrik Avila Prima Intra Makmur yang terjadi di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sangat menarik untuk ditulis dengan pertimbangan pembahasan yang unik terkait sektor kemaritiman, yang masih belum ada pihak yang meneliti.

Persoalan perburuhan sangat ditentukan oleh sistem ekonomi dunia, khususnya pada sistem ekonomi kapitalis. Kaum buruh cenderung dieksploitasi (dipekerjakan secara berlebihan), diperas tenaganya untuk menghasilkan keuntungan. Sayangnya, nilai lebih tidak kembali kepada buruh, tetapi kembali kepada pihak pengusaha (kaum kapitalis). Buruh hanya menerima upah tertentu dari majikannya, dan upah sama sekali tidak mempresentasikan pembagian keuntungan yang diperoleh pihak majikan

(perusahaan). Pada 1998-2000an Pabrik Avila Prima Intra Makmur telah terjadi banyak penyimpangan, para buruh kurang memahami terkait isi dari UU perburuhan. (Sandra: 1961, hlm 8-9). Timbulnya gerakan buruh pabrik Avila Prima Intra Makmur di Kecamatan Muncar akibat dari pelaksanaan hubungan kerja yang tidak harmonis antara buruh dan majikan. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan antara buruh dengan pengusaha, dimana buruh berhak menerima upah yang disepakati atau upah menurut ketentuan yang berlaku. Para pihak sering mengabaikan kesepakatan yang telah distujui bersama, sehingga hubungan kedua pihak menjadi terganggu, bahkan berakhir dengan PHK pada buruh.

## 2. Metode Penelitian, Pendekatan dan Kerangka Teori

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah. Menurut Louiss Gottschalk, metode sejarah adalah proses mencari sumber / data juga menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Langkah-langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik ekstern dan intern, analisis dan interpretasi, penyajian dalam bentuk tulisan (historiografi). (Kuntowijoyo, 2005: 90)

Pada tahapan pertama, dalam penelitiannya penulis menggunakan Pengumpulan sumber-sumber yang meliputi sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer yang didapat melalui sebuah wawancara dengan buruh pabrik Avila Prima Intra Makmur dan masyarakat sekitar kejadian terkait dengan terjadinya gerakan buruh. Sedangkan sumber skunder adalah sumber yang diperoleh dengan mengumpulkan buku-buku literature yang sesuai dengan topik. Sumber skunder yang digunakan meliputi semua bahan yang telah diterbitkan maupun belum relevan dengan persoalan yang dibahas. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat seperti perpustakaan Fakultas Sastra, Perpustakaan Universitas Jember, buku-buku dari koleksi pribadi, dan juga browsing melalui internet.

Tahap kedua yakni Tahapan kedua yaitu kritik sumber meliputi ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk memperoleh keaslian sumber (otentitas), dengan cara meneliti bahan yang digunakan untuk mendapatkan kredibilitas sumber (dapat dipercaya atau tidak), untuk melakukan pencarian secara detail khusus para saksi sejarah, karena sejarah harus mengandung 4 aspek subyek sejarah yaitu aspek biografis, aspek geografis, aspek kronologis, dan aspek fungsional. (Sartono Kartodirdjo:1993, 16).

Tahap ketiga yaitu proses analitis dari data atau sumber sejarah yang telah didapat, proses ini disebut sebagai proses analisis. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dengan didasarkan pada pertanyaan 5W+1H. Dan tahap keempat historiografi yakni penulisan sejarah dengan model deskriptis dan analisis.

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan skripsi ini adalah pendekatan sosiologi industri, untuk membahas karakter dan arti dunia kerja, serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. (M.A. Smith, 1-26). Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkapkan masalah yang timbul terkait perselisihan perburuan di Avila Intra Makmur Kecamatan Muncar tahun 2001-2003.

Setiap permasalahan yang muncul dalam penelitian ini di coba di pecahkan dengan menggunakan teori perselisihan perburuan dan Menurut teori Eugene V. Schneider, terjadinya perselisihan perburuan antara kaum buruh dengan kaum pengusaha dikarenakan adanya konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Perusahaan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menekan biaya operasional perusahaan, termasuk didalamnya upah buruh yang sekecil-kecilnya. Sebaliknya buruh memperjuangkan hak-haknya dengan berbagai taktik dan siasat termasuk mendirikan serikat.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Karakteristik Kecamatan Muncar

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa. Secara astronomis kabupaten ini berada pada posisi  $7^{\circ} 43'$  -  $8^{\circ} 46'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 53'$  -  $114^{\circ} 38'$  Bujur Timur. Memiliki luas wilayah 5.782,50 km<sup>2</sup> dengan dataran tinggi puncak Gunung Raung 3.282 m dan Gunung Merapi 2800 m. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi yang berupa pegunungan sebagai daerah penghasil produk perkebunan, dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian. Daerah sekitar garis pantai yang memiliki panjang sekitar 175,8 km, membujur dari arah utara ke selatan sebagai daerah penghasil berbagai biota laut. (Draft Buku Putih Sanitasi:2012, 2).

Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan, meliputi Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin, Banyuwangi, Giri, Kalipuro, Wongsorejo, dan Muncar. Kecamatan

Muncar memiliki luas 873.735 km<sup>2</sup> atau 8.737,35 hektar.

Kecamatan Muncar memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi antara bulan November sampai April, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai bulan Oktober. Pergantian musim dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi aktifitas dan kegiatan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Secara garis besar, kehidupan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh kondisi musim. Hal tersebut kemudian mendasari munculnya kerjasama antara petani dan nelayan. Pada musim penghujan banyak petani yang ikut bekerja sebagai nelayan, karena dalam kurun waktu tersebut banyak dibutuhkan tenaga kerja sebagai nelayan pandega (buruh). (Draft Buku Sanitasi Putih, 5-6). Sebaliknya, pada musim kemarau banyak nelayan yang bekerja sebagai petani penggarap sawah dan ladang.

Pantai Kecamatan Muncar menjadi pusat kegiatan pernelayanan masyarakat Muncar pada umumnya. Masyarakat Muncar terdiri dari 4 kelompok etnis yang diantaranya: Madura, Jawa, Bugis, dan China. (M. Hadi Sundoro:1986, 15). Sebagian besar dari masyarakat Muncar merupakan etnis Madura, hal ini dikarenakan migrasi besar-besaran etnis Madura yang berasal dari pulau Madura ke daerah Karesidenan Besuki, terutama di wilayah Muncar. Migrasi ini dilakukan oleh masyarakat Madura dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi.

Perikanan di Jawa Timur, yang berada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah perikanan yang memiliki potensi ikan besar. Kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada musim ikan yang berlangsung di daerah tersebut. Muncar terus berkembang dengan kemajuan serta kesejahteraan yang mampu dicapai oleh nelayan sekitar. Saat musim ikan reda, jenis biota laut lain muncul seperti halnya ubur-ubur. Menurut Pamudji (33), nelayan Muncar keturunan Jawa, ubur-ubur biasanya dijual untuk diekspor ke Korea. Harganya tidak kalah dengan ikan lainnya, yakni berkisar Rp 10.000 per kilogram. Mudahnya mendapatkan hasil laut di Pantai Muncar tidak lepas dari kondisi geografis Muncar. Kuatnya arus di Selat Bali membawa ikan dan biota laut lainnya ke Teluk Pangpang. Menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat nelayan menjaring ikan yang terseret arus dan terjebak di teluk. Namun, potensi tersebut tidak selamanya dapat dinikmati nelayan. Pada tahun 1999-2001, perdagangan Muncar lumpuh total karena

paceklik berkepanjangan. Paceklik yang biasanya hanya 1-2 bulan, pada tahun-tahun tersebut terjadi sampai 2 tahun. Hasil tangkapan ikan merosot drastis dari 80.000 ton menjadi sekitar 20.000 ton. Nelayan menganggap kondisi tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan dari limbah pabrik. Namun, pabrik besar menyalahkan perubahan pada iklim. (Dinas Perikanan Banyuwangi:2015). Berkembangnya industri perikanan di Muncar menjadi salah satu faktor perkembangan perikanan di wilayah tersebut. Di sisi lain, perkembangan juga berdampak terhadap kondisi alam kelautan di sekitar wilayah Muncar.

Terdapat kawasan industri perikanan di Kecamatan Muncar,, terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pengolahan ikan. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut yang kemudian mendorong kemajuan industri pengolahan ikan di Muncar. Perkembangan sektor perikanan di wilayah Muncar berdampak terhadap kemunculan perusahaan-perusahaan pengalengan ikan di Kecamatan Muncar. Berbagai industri pengolahan ikan telah berkembang di daerah tersebut. Jenis industri pengolahan yang ada antara lain: industri minyak ikan, pengalengan ikan, tepung ikan, *cold storage* dan industri pengolahan ikan lainnya. Pada tahun 2001 tercatat sekitar 52 industri pengolahan ikan secara besar dan 21 industri ikan dalam skala kecil.

Sebaran lokasi industri pengolahan ikan di Muncar ini meliputi 3 desa yaitu Desa Kedungrejo, Blambangan, dan Tembokrejo. Perusahaan pengalengan ikan menjadi pusat industri perikanan di Kecamatan Muncar. Hasil pengolahan ikan, tidak hanya memasuki pasar lokal yang meliputi : Kota Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, dan kota-kota lain di Pulau Jawa dan Bali, namun telah menembus pasar ekspor. Proses distribusi atau penjualan dilakukan di dalam pelabuhan. Proses penjualannya berlangsung ketika para saudagar atau para pemborong datang secara langsung, ke tempat-tempat pengolahan ikan di pelabuhan dan membeli ikan-ikan hasil olahan dalam jumlah besar. Ikan-ikan olahan akan dijual kembali oleh para pemborong kepada para pengecer dan konsumen di luar negeri maupun dalam negeri.

Produksi pengolahan ikan di Muncar pada tahun 2001 perharinya telah mencapai sekitar 1.149 ton. (Wawancara Sholihin:2015). Produksi tersebut dilakukan oleh perusahaan berskala besar dan kecil yang meliputi pengalengan ikan, tepung ikan, cold storage ikan, minyak ikan. Produksi pengolahan ikan berskala besar di Muncar pada tahun 2001 yakni pengalengan ikan sebanyak 137 ton perhari, tepung ikan 489 ton perhari, cold storage ikan 198 ton perhari, minyak ikan 21 ton perhari serta pengolahan ikan

dalam bentuk lain sebanyak 304 ton perhari. (Wawancara Sholihin : 2015).

Industri perikanan di Kecamatan Muncar yang dikelola oleh perusahaan besar dan perusahaan kecil, memberikan sumbangsih atas kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, industri tersebut secara tidak langsung juga menambah pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini didasarkan atas kesejahteraan masyarakat yang mampu berpartisipasi aktif dengan mengembangkan industri rumahan, berupa industri pengolahan ikan yang juga ikut bersaing dengan perusahaan swasta di wilayah tersebut. Di sisi lain perkembangan perusahaan industri pengolahan ikan milik swasta bukan saja berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat Muncar. Namun juga berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat. Banyaknya perusahaan swasta yang berkembang di Muncar, mampu mendorong masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta gaya hidup masyarakat Muncar.

### 3.2 Konflik Buruh Avila Intra Makmur

Kondisi buruh di Pabrik Avila Prima Intra Makmur dalam menjalankan usaha produksinya, tidak lepas dari peran buruh sebagai tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Avila Prima Intra Makmur, menerapkan sistem tenaga kerja borongan, mingguan dan bulanan. Para buruh yang bekerja sesuai dengan aturan pabrik, yaitu diwajibkan untuk melakukan absensi yang sudah tersedia di mesin *Finger Check Clock*. Jika buruh tersebut tidak masuk kerja karena berhalangan atau sakit, wajib memberitahukan secara tertulis kepada supervisor atau kepala bagian untuk dicarikan pengganti sementara. Di pabrik Avila Prima Intra Makmur ini terdapat tiga jenis pengupahan tenaga kerja yang terdiri dari upah tenaga kerja borongan, mingguan dan bulanan.

Perselisihan perburuhan di Avila Prima Intra Makmur awalnya dipicu dengan tidak dibayarnya upah lembur kerja buruh mingguan, berawal dari duabelas buruh meliputi: 1. Bibit Sajai, 2. Simon Wathimuri, 3. Suriyanto, 4. Suvandri Waluyo, 5. Mustani, 6. Sugeng Wiyono 7. Edy Sariyono, 8. Sugianto, 9. Tri Agung Wahyudi, 10. Suratriani, 11. Diana Askurin, 12. Aloysius Bayu. Mereka lembur kerja mulai pukul 07:00-01:00 WIB, dengan kebiasaan mengisi absensi terlebih dahulu sebelum meninggalkan pekerjaan. Namun duabelas buruh ini tidak mengisi absensi dan langsung pulang meninggalkan pekerjaan. Keesokkannya ke duabelas buruh, meminta kepada pihak perusahaan agar gaji lemburnya dibayarkan.

Namun pihak perusahaan menolak, karena tidak ada bukti absensi lembur dari buruh.

Penjelasan dan saksi satpam yang menceritakan kronologi kejadian perihal check lock ternyata ditolak oleh Alex, gaji lembur kerja yang kemarin tidak dibayarkan. Tidak ada bukti yang kuat bahwasanya ke duabelas buruh tersebut telah bekerja lembur, karena pada absensi tidak ada nama ke duabelas buruh itu. Kejadian seperti ini jelas merugikan bagi kaum buruh. Kejadian ini membuat ke duabelas buruh tersebut kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini penyebab munculnya gerakan buruh di perusahaan ini.

Pada tanggal 17 November 2001, para buruh melakukan aksi mogok kerja di pabrik Avila Prima Intra Makmur. Dalam menjalankan aksinya, para buruh mengajukan tuntutan kepada Alex Wahyudin yang menjabat sebagai Kepala HRD, agar upah lembur kerja ke duabelas rekannya dibayar, yang bernama Bibit Sajai, Simon Wathimuri, Suriyanto, Suvandri Waluyo, Mustani, Sugeng Wiyono, Edy Sariyono, Sugianto, Tri Agung Wahyudi, Suratriani, Diana Askurin, dan Aloysius Bayu. Para buruh mengancam, akan tetap melanjutkan aksinya jika pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan buruh. Ancaman dari buruh ini, ternyata tidak di tanggapi oleh pihak perusahaan, karena di absensi tidak ada bukti masuk kerja ke duabelas buruh.

Para buruh kemudian melanjutkan aksinya hingga turun ke jalan pada tanggal Senin 19 November 2001 di depan pabrik Avila Prima Intra Makmur. Aksi demo ini di gerakkan oleh Indra Cahya yang bekerja di bagian Pengolahan Fish Meal. Ia mengerakkan rekan-rekan buruh untuk bersama-sama menghadapi pihak perusahaan. Aksi demo ini mendapat pengamanan ketat dari pihak polisi dan TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat), yang diterjunkan di lokasi atas permintaan pihak perusahaan. Dalam menjalankan aksinya, diperkirakan ada sekitar 500 buruh pabrik yang mengikuti, terdiri dari buruh borongan dan mingguan.

Terjadinya aksi turun ke jalan dikarenakan para buruh ingin menuntut haknya sebagai buruh, yang semestinya diberikan oleh pihak Avila Prima Intra Makmur. Maka dari itu, selain menuntut gaji lembur yang tidak dibayarkan, mereka juga menuntut 8 kebijakan yang meliputi : 1) seragam kerja yang dulunya 1 tahun ganti, kini 6 bulan sekali bisa ganti agar tidak terlihat kumal, 2) upah lembur sesuai jam kerja, misalnya upah kerja per hari Rp 12.000 maka upah lembur juga sama dengan upah kerja, karena upah lembur di Avila Prima Intra makmur sebelumnya hanya Rp 6000 per hari. 3) kenaikan upah kerja mingguan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per hari

sesuai dengan UMK Kabupaten Banyuwangi, 4) jaminan kesehatan yang awalnya hanya untuk buruh bulanan, dapat di peruntukkan juga bagi buruh mingguan dan borongan. Jaminan tersebut dalam bentuk asuransi, agar buruh yang sakit dapat berobat dengan gratis, 5) hari Minggu jam lemburnya dibatasi, biasanya dari pukul 07.00-01.00 WIB kini diharuskan hanya pukul 07:00-13:00 WIB, agar buruh dapat beristirahat dirumah, 6) cuti haid yang biasanya tidak diberikan upah kini harus di bayarkan. Jika buruh tidak masuk kerja selama tiga hari karena haid, maka buruh ini berhak menerima upah, yang berlaku untuk buruh bulanan dan mingguan, 7) cuti hamil yang sebelumnya tidak dibayar selama tiga bulan kini harus dibayarkan, ketika kandungan telah memasuki 9 bulan buruh harus cuti. Cuti hamil ini hanya di terapkan pada buruh mingguan dan bulanan saja, 8) mengikuti serikat pekerja, agar pihak perusahaan memberikan hak buruh sebagai pekerja. Para buruh mengajukan 8 tuntutan tersebut, diharapkan ada perbaikan nasib bagi kaum buruh untuk mendapatkan hak buruh yang layak di Avila Prima Intra Makmur.

Para buruh yang melakukan aksi demo secara besar-besaran tersebut kebanyakan diikuti oleh buruh mingguan. Mereka merasa kurang sejahtera dengan pendapatan upah rendah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi yang hanya Rp 12.000 per hari, sedangkan UMK Banyuwangi pada buruh mingguan berkisar Rp 15.000 per hari. Upah buruh pekerja mingguan di Avila Prima Intra Makmur lebih rendah dibandingkan tenaga kerja borongan yang upahnya mencapai Rp 17.000 per hari, sedangkan pekerja mingguan per harinya hanya menerima Rp 12.000. Kemudian upah tenaga kerja bulanan di Avila Prima Intra Makmur sebesar Rp 450.000 perbulan, yang sesuai dengan UMK Banyuwangi. Rendahnya upah kerja yang tidak sesuai UMK pada tenaga kerja mingguan, membuat para buruh dan rekan-rekannya melakukan aksi demo agar kehidupan mereka sejahtera. Berlangsungnya aksi tersebut membuat perusahaan berjanji untuk memenuhi 8 tuntutan yang diajukan buruh, secara bertahap.

Setelah terjadinya aksi demo dan pengajuan 8 tuntutan tersebut, para buruh melakukan pemogokan kerja kembali dari tanggal 20 Nopember 2001 sampai tanggal 24 Desember 2001, sampai tuntutannya terpenuhi oleh pihak Avila Prima Intra Makmur. Pemogokan kerja yang terus berlanjut, mengakibatkan juragan ikan di Kecamatan Muncar yang biasanya mengirimkan ikan di pabrik tidak jalan, sehingga mengalami kerugian. Akibat dari kerugian ini memunculkan aksi premanisme suruhan juragan ikan yang terdiri dari sembilan orang. Para preman bayaran yang melakukan aksinya di pertengahan malam pukul

23.30 WIB. Mereka mendatangi satu per satu rumah rumah buruh yang menjadi penggerak demo, meliputi: 1. Indra Cahya, 2. Bibit Sajai, 3. Simon Wathimuri, 4. Suriyanto, 5. Suvandri Waluyo, 6. Mustani, 7. Sugeng Wiyono, 8. Edy Sariyono, 9. Sugianto, 10. Tri Agung Wahyudi, 11. Suratriani, 12. Diana Askurin, dan 13. Aloysius Bayu. Menurut Bibit Sajai, buruh yang pernah bekerja di bagian pembersih sisik ikan menjelaskan, para preman yang terdiri dari Sembilan orang dengan berbadan kekar mendatangi rumah buruh dan memberi ancaman. Ketiga preman ini mengancam akan menghabiskan nyawa buruh jika masih nekat meneruskan aksi demo dan mogok kerja. Selain ancaman, para preman ini telah melakukan kekerasan pada buruh.

Kemudian keesokan harinya, aksi para preman bayaran ini di dengar oleh buruh lainnya, dan mereka tidak terima akan terjadinya kekerasan yang menimpa ke tiga belas rekannya. Berkaitan dengan ini, Suratriani mantan buruh pabrik Avila Prima Intra Makmur di bagian pengawasan produksi ikan tuna menjelaskan, pada tanggal 26 Desember 2001 para buruh melakukan aksi demo turun ke jalan dengan diikuti hampir seribu massa, yang meliputi buruh pabrik, saudara buruh, teman buruh, dan tetangga buruh. Dalam melakukan aksinya buruh menggunakan angkutan 10 truk, yang dana penyewaannya hasil dari iuran buruh pabrik Avila Prima Intra Makmur. Pertama, para buruh melakukan aksi demo di depan pabrik Avila Prima Intra Makmur, untuk menemui Alex Wahyudin sebagai Kepala Personalia. Namun para buruh tidak dapat menemuinya, karena Alex tidak ada di lokasi. Kedua, buruh berlanjut menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, untuk menemui ketua DPRD yang saat itu dijabat oleh H. Abdurahman Hasan. Unjuk rasa yang dilakukan buruh ini untuk meminta perlindungan agar tidak dilakukan dengan semena-mena, contohnya tindak kekerasan premanisme yang dialami buruh. Akan tetapi, para buruh tidak menemui ketua DPRD tersebut dan hasil yang sama juga diperoleh oleh para buruh karena belum ada tanggapan. Kemudian mereka mendatangi kantor Bupati Banyuwangi, menemui bupati yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Samsul Hadi, dan buruh tidak dapat menemuinya. Hal tersebut lakukan karena buruh butuh kesejahteraan, serta perlindungan agar tidak lagi terjadi penindasan terhadap buruh.

Demi menyelesaikan aksi mogok kerja Avila Prima Intra Makmur, Pihak perusahaan mengundang beberapa orang perwakilan dari buruh untuk berunding. Perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha tujuannya untuk mendiskusikan adanya permasalahan, serta mencari solusi untuk mengatasinya.

Menurut Antonius, mantan Wakil Personalia Avila Prima Intra Makmur menjelaskan, bipartit antara pihak pabrik dan buruh dilakukan pada tanggal 12 November 2001, bertempat di pabrik Avila Prima Intra Makmur Kecamatan Muncar dengan mengundang perwakilan dari buruh, yang meliputi: 1. Indra Cahya, 2. Bibit Sajai, 3. Simon Wathimuri, 4. Suriyanto, 5. Suvandri Waluyo, 6. Mustani, 7. Sugeng Wiyono, 8. Edy Sariyono, 9. Sugianto, 10. Tri Agung Wahyudi, 11. Suratriani, 12. Diana Askurin, dan 13. Aloysius Bayu. Ke tigabelas buruh ini berunding bersama Alex Wahyudin sebagai Kepala Personalia, dengan mengundang Kepala Desa Tembokrejo yang saat itu dijabat oleh Agus Suyono. Dalam perundingan ini, pihak perusahaan menginginkan buruhnya dapat bekerja kembali. Kemudian dari pihak buruh menginginkan upah lembur kerja ke duabelas buruh, yang bernama Bibit Sajai, Simon Wathimuri, Suriyanto, Suvandri Waluyo, Mustani, Sugeng Wiyono, Edy Sariyono, Sugianto, Tri Agung Wahyudi, Suratriani, dan Diana Askurin, upahnya segera dibayarkan. Namun pihak perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutananya, karena dari ke duabelas buruh tersebut tidak ada bukti masuk lembur kerja di absensi. Sehingga perundingan ini tidak membuahkan hasil.

Pada tanggal 19 Mei 2001, telah diadakan pertemuan kembali antara pihak perusahaan dan buruh di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang diinginkan buruh mengenai tuntutan hak-haknya. Atas hal tersebut pihak Avila Prima Intra Makmur menjelaskan, bahwasannya para buruh pabrik Avila Prima Intra Makmur mogok kerja dan tidak melakukan pekerjaannya, sejak tanggal 5 November 2001 sampai tanggal 12 Mei, menyebabkan Avila Prima Intra Makmur tidak dapat beroperasi selama enam bulan. Sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian hingga milyaran rupiah.

Selain itu para buruh menuntut hak-haknya yang berupa delapan kebijakan yang harus dipenuhi oleh pihak pabrik Avila Prima Intra Makmur. Delapan kebijakan tersebut meliputi : 1) seragam kerja 6 bulan ganti tidak terlihat kumal, 2) upah lembur sesuai jam kerja, misalnya upah kerja per hari Rp 12.000 maka upah lembur juga sama dengan upah kerja, karena upah lembur di Avila Prima Intra makmur sebelumnya hanya Rp 6000 per hari. 3) kenaikan upah kerja mingguan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per hari sesuai dengan UMK Kabupaten Banyuwangi, 4) jaminan kesehatan yang awalnya hanya untuk buruh bulanan, dapat di peruntukkan juga bagi buruh mingguan dan borongan. Jaminan tersebut dalam bentuk asuransi, agar buruh yang sakit dapat berobat

dengan gratis, 5) hari Minggu jam lembur kerjanya di batasi, yang biasanya dari pukul 07.00-01.00 kini diharuskan pukul 07:00-13:00 WIB, agar buruh dapat beristahat dirumah, 6) cuti haid yang biasanya tidak menerima upah kini harus dibayarkan. Jika buruh tidak masuk kerja selama tiga hari karena haid, maka buruh ini berhak menerima upah, yang berlaku untuk buruh bulanan dan mingguan, 7) cuti hamil yang sebelumnya tidak dibayar selama tiga bulan, kini harus dibayarkan ketika kandungan sudah memasuki 9 bulan, dan memasuki bulan tersebut buruh sudah cuti. Cuti hamil ini hanya di terapkan pada buruh mingguan dan bulanan saja, 8) mengikuti serikat pekerja, agar pihak perusahaan memberikan hak buruh sebagai pekerja.

Setelah diadakan pertemuan pada tanggal 19 Mei 2001, terkait perselisihan antara pihak perusahaan dan buruh, di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. Maka berdasarkan surat keputusan dari panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P. 4-Pusat) Nomor: 941/913/146-6/XIII/PHK/06-2002 tertanggal 18 Juni 2002 tentang penyelesaian PHK terhadap kepada 117 orang. Maka dengan ini disampaikan pengumuman kepada pekerja ter-PHK, bahwasannya dengan turunnya Surat Keputusan dari P. 4 Pusat, maka hubungan kerja antara perusahaan dengan para buruh telah berakhir, dan keputusan tersebut merupakan bentuk penyelesaian terakhir (final) sampai dengan akhir Juni 2002 sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 1957.

Setelah dilakukannya PHK kepada 117 orang, pihak Avila Prima Intra Makmur memenuhi tuntutan hak-hak buruh dengan terpenuhinya delapan tuntutan. Menurut Mohammad Alfian mantan buruh yang bekerja di bagian pembersihan sisik ikan menjelaskan, dari delapan tuntutan yang diajukan buruh, pihak perusahaan sudah memenuhinya secara bertahap. Pihak buruh yang ter PHK hanya pasrah dan menerima keputusan dari pihak perusahaan sebagai bentuk penyelesaian perselisihan perburuhan. Kemudian dari rekan-rekan buruh lainnya sudah tidak melakukan pembelaan terhadap ke 117 rekannya, karena mereka takut kehilangan pekerjaan di Avila Prima Intra Makmur. Dampak sosial pasca terjadinya perselisihan perburuhan di Avila Intra Makmur berpengaruh terhadap aspek perubahan sosial masyarakat sekitar. Salah satu perubahan sosial tersebut yakni munculnya rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat antar sesama buruh. Persatuan yang dijalin oleh para buruh dan keluarga buruh terutama di lingkungan masyarakat Muncar sekitar pabrik Avila Prima Intra makmur, menjadi modal kaum buruh untuk mendapatkan perbaikan nasib terhadap kaum buruh. Tuntutan para buruh pada umumnya adalah menginginkan upah yang layak sesuai dengan UMK di Kabupaten Banyuwangi.

Perjuangan yang telah dilakukan oleh para buruh Avila Prima Intra Makmur bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga, nama baik, dan materi. Melainkan masa depan dan pekerjaan buruh di perusahaan tersebut.

Dampak berikutnya yakni dampak ekonomi. Pengaruh atau dampak ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Pasca terjadinya perselisihan perburuhan di Avila Prima Intra Makmur, pengaruh ekonomi sangat dirasakan oleh pihak perusahaan maupun buruh. Pengaruh ini membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian masyarakat Muncar. Konflik antara pihak perusahaan dengan buruh yang diakhiri dengan kesepakatan berupa PHK terhadap 117 buruh, serta pihak Avila Prima Intra Makmur memenuhi tuntutan hak-hak buruh yakni diantaranya: seragam kerja yang dulunya 1 tahun ganti, kini 6 bulan sekali bisa ganti, gaji lembur yang sesuai jam, kenaikan upah kerja dari Rp8500-Rp12000 per hari, jaminan kesehatan yang awalnya hanya untuk buruh bulanan, dapat di peruntukkan juga bagi buruh harian dan borongan, hari Minggu harus dihitung sebagai lembur kerja, dari jam 07:00-13:00 WIB, cuti haid tetap dibayarkan, cuti hami tetap dibayarkan ketika kandungan sudah memasuki 9 bulan, memasuki bulan tersebut buruh sudah cuti, mengikuti serikat buruh. Dari delapan tuntutan yang diajukan buruh, pihak perusahaan sudah memenuhi secara bertahap. Penyelesaian konflik perburuhan dengan PHK terhadap 117 buruh, membuat para buruh ini kehilangan pekerjaannya di Avila Prima Intra Makmur.

#### 4. Kesimpulan

Perkembangan Pabrik Avila Prima Intra Makmur di Kecamatan Muncar dan munculnya perselisihan perburuhan yang di latar belakang oleh tuntutan buruh yang tidak segera di penuhi oleh pihak perusahaan. Tuntutan tersebut meliputi 8 kebijakan yang diantaranya : 1) seragam kerja yang dulunya 1 tahun ganti, kini 6 bulan sekali ganti, 2) upah lembur sesuai jam kerja, 3) kenaikan upah kerja mingguan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per hari sesuai dengan UMK Banyuwangi, 4) jaminan kesehatan yang awalnya hanya untuk buruh bulanan, kini juga di peruntukkan pada buruh mingguan dan borongan, 5) hari Minggu jam lembur dibatasi, biasanya dari pukul 07.00-01.00 kini hanya pukul 07:00-13:00 WIB, 6) cuti haid yang sebelumnya tidak menerima upah kini harus dibayarkan, ketentuan ini berlaku untuk buruh bulanan dan mingguan, 7) cuti hamil tiga bulan yang sebelumnya tidak dibayar kini harus dibayar, jadi

memasuki kehamilan 9 bulan buruh mulai cuti. Kebijakan ini diterapkan pada buruh mingguan dan bulanan, 8) mengikuti serikat pekerja, agar pihak perusahaan memberikan hak buruh sebagai pekerja. Hal ini dilakukan agar ada perbaikan nasib bagi kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan.

Munculnya pemogokan di Avila Prima Intra Makmur di picu dengan tidak diberikannya upah lembur kerja terhadap ke 12 buruh yang meliputi : Bibit Sajai, Simon Wathimuri, Suriyanto, Suvandri Waluyo, Mustani, Sugeng Wiyono, Edy Sariyono, Sugianto, Tri Agung Wahyudi, Suratiani, Diana Askurin, dan Aloysius Bayu. Pada tanggal 5 November 2001 sampai 17 November 2001, para buruh melakukan aksi mogok kerja dengan masuk kerja seperti biasa tetapi tidak melakukan aktivitas apapun di dalam pabrik. Dalam menjalankan aksinya, para buruh menuntut Alex Wahyudin, agar upah lembur kerja ke duabelas rekannya dibayar. Para buruh mengancam, akan tetap melanjutkan aksinya jika pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutan buruh. Namun ancaman buruh tidak di tanggapi pihak perusahaan, sehingga para buruh melanjutkan aksinya turun ke jalan pada tanggal 19 November 2001 di depan pabrik Avila Prima Intra Makmur. Aksi ini di gerakkan oleh Indra Cahya yang bekerja di bagian pengolahan fish meal, dengan diikuti sekitar 500 buruh untuk bersama-sama menghadapi pihak perusahaan. Berlangsungnya aksi demo tersebut mendapat pengamanan ketat dari pihak polisi dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Para buruh menuntut haknya sebagai buruh agar dipenuhi oleh pihak perusahaan.

### Daftar Pustaka

#### 1 Buku dan Jurnal

Badan Pusat Statistik (BPS). Kecamatan Muncar Dalam Angka 2014. Banyuwangi: 2015.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Laporan Sektor Perikanan Banyuwangi. Banyuwangi: 2012.

Dinas Perikanan Banyuwangi. Analisis Potensi Pesisir Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi: 2013.

\_\_\_\_\_. Draf Buku Putih Sanitasi. Kabupaten Banyuwangi: 2012.

Jalil, Abdul. Teologi Buruh. Yogyakarta: Lkis, 2008.

Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

Kartodirdjo, Sartono. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia, 1984.

Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia, 1981.

Kuwat Widodo, Sutejo. Dinamika Kebijakan Terhadap Nelayan Tinjauan Historis Pada Nelayan Pantai Utara Jawa, 1900-2000. Semarang: 2007.

Marsh and J. Soulsby. Hukum Perjanjian. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Materu, Moh. Sidky Daeng. Sedjarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 1970.

Nugroho, Kris. Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik. Surabaya : Universitas Airlangga, 2005.

Nurhadi Sasmita, Nawiyanto, Latifatul Izzah, Parwata, Sunarlan. Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. Yogyakarta: Lembah Manah, 2012.

Pamungkas, Putra. Impilikasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pesisir atas Turunnya Hasil Tangkapan (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Muncar Kabupaten Banyuwangi). Kabupaten Banyuwangi: 2012.

Pemerintah Daerah Banyuwangi. Laporan penanggung Jawaban Kinerja. Kabupaten Banyuwangi: 2014.

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.

Sandra. Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia. Djakarta: PT. Pustaka Rakjat, 1961.

S.B. Marsh and J. Soulsby. Hukum Perjanjian, penerjemah Abdulkadir Muhammad. Bandung: P.T. Alumni, 2006.

Schneider, Eugene V. 1986. Sosiologi Industri. Alih bahasa Ginting, J. L. Aksara Persada.

\_\_\_\_\_. Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia. Djakarta: Badan Penerbittan Dewan Nasional SOBSI, 1958.

Setiyono dan Satmoko Yudo. Potensi Pencemaran Ikan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi: 2014.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Universitas Indonesia, 1977.

Soesanto, Astrid S. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Sri Soekemi R. B., Jakoeb Hidayat, Koesjono. Hubungan Ketenagakerjaan. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988.

Sumardiati, Siti. Perkembangan Usaha Penangkapan Ikan di Muncar Tahun 1970-Tahun 1983. Jember: Universitas Jember, 2005.

Sundoro, M. Hadi. Pengaruh Modernisasi Perikanan Terhadap Nelayan di Kabupaten Banyuwangi. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember, 1986.

Suhartono. Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.



Susetiawan. Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.  
Utomo. Pemogokan Buruh Tani di Abad ke-19. Jakarta: LP3ES, 1983.

#### Sumber Internet

Bappekab Banyuwangi. Sejarah Banyuwangi. <http://sunriseofjava.com/berita-1071-naga-bulan-bukti-berkembangnya-industri-banyuwangi-jaman-dulu.html>, diunduh pada tanggal 2 Februari 2015.  
<http://www.foxitsoftware.com>, diunduh pada tanggal 20 September 2015.  
<http://www.ditkapel.dephub.go.id/Sejarah-Direktorat-Jenderal-Perhubungan-Laut>, diunduh pada tanggal 19 Juni 2015.  
<http://www.mediapenyuluhan.blogspot.com>, diunduh pada tanggal 16 November 2015.  
<http://www.inggitberbagi.com>, diakses pada tanggal 3 Februari 2015.  
<http://www.wacananusantara.org/kerajaan-blambangan/>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2015.  
Safitri Wahyuni, Asal Usul Nama Muncar, dalam <http://safitriwahyuni.blogspot.co.id/2013/12/asal-usul-nama-muncar.html>, diunduh pada tanggal 17 Juni 2015.  
Sjoekrie, Sejarah Perikanan Indonesia, dalam <http://mukhtar-api.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 19 juni 2012.  
TEMPO. “Hari Buruh dan Fakta Mengapa Disebut May Day”, dalam <https://m.tempo.com>, diunduh pada tanggal 17 Januari 2016.

